Matrik Temuan

HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Periode 01/01/2000 sd. 18/04/2016

Tindaklanjut sd. 18/04/2016

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.V/LHA/R/PS.00/0138/2009 06/03/2009 Kandepag Kab. Muko Muko Prov. Bengkulu	**Aspek Tugas & Fungsi** 4 Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf 1. Masih tedapat 101 persil/lokasi belum bersertifikat, sudah ber AIW sebanyak 98 lokasi dan belum ber AIW sebanyak 3 lokasi . 2. Unit pengumpul zakat (UPZ) baik Tk. Kec. dan instansi/pemerintah telah terbentuk namun kegiatannya tidak berjalan secara efektif khususnya di lingkungan instansi/pemerintah. Aspek Manajerial 1. RKT sebagai salah satu kendali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk lebih terarah, tertib, terukur dan berkesinambungan belum dibuat. 2. LAKIP sudah dibuat namun belum dilakukan penilaian /evaluasi secara tertib. < 0702 >	1 - Alokasi dana untuk pensertifikatan tanah wakaf dan sarana yang dibutuhkan belum ada, serta adanya penggantian pengurus/petugas unit pengumpul zakat. - Pembinaan personil belum berjalan secara efektif dan pelaksanaan waskat masih lemah. < 0104 >	1 Mengupayakan sertifikasi tanah wakaf sebanyak 101 persil/lokasi, ber AIW sebanyak 98 lokasi dan belum ber AIW sebanyak 3 lokasi. < 0901 >	26-06-2009 1 Dalam Proses < 0308 > P 26-10-2011 2 PROSES telah ditindaklanjuti pada saat pendampingan tim LK Itjen tgl 17-30 Juli 2011. Copy surat usulan ke BP4. P Auditor : Robby < 0307 >

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.V/LHA/R/PS.00/0138/2009 06/03/2009 Kandepag Kab. Muko Muko Prov. Bengkulu				14-06-2012 3 PROSES Bukti belum terlampir Auditor : Sri Hindriyanti (Pemuktahiran Ortala, hotel GrandCandi-Semarang, tgl 13-15 Juni 2012) < 0307 > P
				19-11-2015 4 PROSES Sudah di Tindak Lanjuti 15 Sertifikat terlampir, sisa 86 lagi yang belum di tindak lanjuti Gerwas, Hotel Horizon Bekasi, 11-13 November 2015 Auditor : Desmi Tanggal 12/11/2015 < 0308 > P
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara				12-11-2015
	1 Perspektif Stakeholder A. Bantuan FKUB Tingkat Kabupaten/Kota 1. Juknis pemberian bantuan belum dibuat dan laporan hasil kegiatan dari FKUB baru sebatas pertanggungjawaban keuangan belum menyajikan informasi capaian hasil kegiatan yang dilakukan oleh FKUB 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan belum dibuat < 0802 >	1 a. SOP, Juklak atau Juknis sebagai pedoman penyaluran bantuan belum ada b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu **Kandepag**					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	2 B. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Lembaga Wakaf 1. Materi narasumber, evaluasi kegiatan belum dibuat 2. Pre test dan post test dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	3 C. Pembinaan Pengelola 1. Materi narasumber, evaluasi kegiatan belum dibuat 2. Pre test dan post test dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	4 D. Penyuluh Tanah Wakaf 1. Materi narasumber, evaluasi kegiatan belum dibuat 2. Pre test dan post test dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	5 E. Pembinaan Pemberdayaan Zakat Produktif 1. Materi narasumber, evaluasi kegiatan belum dibuat 2. Pre test dan post test dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	6 F. Pembinaan Penerima Zakat (Mustahiq) 1. Materi narasumber, evaluasi kegiatan belum dibuat 2. Pre test dan post test dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	7 G. Pembinaan Pengelola ZIS 1. Materi narasumber, evaluasi kegiatan belum dibuat 2. Pre test dan post test dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu **Kandepag**					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara					
	8 H. Pembinaan Pengurus Majlis Taklim 1. Materi narasumber, evaluasi kegiatan belum dibuat 2. Pre test dan post test dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	10 J. Pembinaan Keluarga Sakinah 1. Didalam laporan tidak terdapat narasumber, CV Narsum, evaluasi kegiatan, serta kuitansi UP tidak sesuai dengan ketentuan; 2. Pre tes dan Post test tidak dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	11 K. Kegiatan Bantuan Sosial untuk sarana Rumah Ibadah 1. Tepat prosedur karena juklak/juknis belum dibuat, proposal dari penerima tidak ada, verifikasi proposal belum ada, dan evaluasi hasil kegiatan bantuan sosial tidak ada; 2. Tepat guna karena kegiatan hanya sebatas laporan pertanggungjawaban keuangan < 0802 >	1 a. SOP, Juklak atau Juknis sebagai pedoman penyaluran bantuan belum ada b. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP c. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan d. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	2 1. Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, pencairan keuangan, kegiatan monitoring dan evaluasi < 0905 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara			3 1. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	12 L. Musabaqah Qira'tul Kutub Didalam Laporan tidak terdapat jadwal kegiatan, foto sebagai bukti dokumentasi, serta CV dewan juri (narsum) dan format kuitansi UP tidak sesuai dengan ketentuan < 0809 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	2 2. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	13 M. Kegiatan Bantuan Lembaga Pendidikan Agama pada Pendidikan Agama Islam 1. juklak/juknis belum dibuat, proposal dari penerima tidak ada, verifikasi proposal belum ada, dan evaluasi hasil kegiatan bantuan sosial tidak ada; 2. Laporan kegiatan hanya sebatas laporan pertanggungjawaban keuangan dari penerima bantuan 3. Laporan hasil penggunaan dana bantuan tidak disampaikan ke kankemenag sehingga waktu penyelesaian pengguna bantuan tidak dapat diketahui secara pasti < 0804 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	14 N. Kegiatan pembinaan Kepala Madin Tingkat Kabupaten pada Pendidikan Keagamaan Islam 1. Tidak ada CV Narsum di dalam laporan hasil kegiatan, evaluasi hasil kegiatan belum dibuat, dan ATK kegiatan belum diinput ke dalam aplikasi persediaan 2. tepat guna karena pre test dan post test tidak dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0803 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	15 O. Kegiatan pembinaan Guru Madin Tingkat Kabupaten pada Pendidikan Keagamaan Islam 1. Tidak ada CV Narsum di dalam laporan hasil kegiatan, evaluasi hasil kegiatan belum dibuat, dan ATK kegiatan belum diinput ke dalam aplikasi persediaan 2. pre test dan post test tidak dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0803 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pengelolaan adminsitrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan c. Pengelola kegiatan tidk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. < 0601 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	16 P. Pembangunan Perpustakaan MAS Al Um 1. Tiak ada juklak/juknis, seleksi dan verifikasi proposal dan monitoring/evaluasi 2. Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan RAB yang dibuat, dalam proposal pengajuannya RKB dengan dana sebesar Rp. 180.000.000,00 tetapi realisasi untuk ruangan perpustakaan sebesar Rp. 196.000.000,00 3. Waktu pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian pekerjaan dilakukan mulai tanggal 24 Juni sampai degan tanggal 23 Agustus, namun tanggal 24 Agustus masih melakukan belanja bahan bangunan 4. Dalam RKAKL diperuntukkan pembangunan perpustakaan pada MAS Darun Naja tetapi proposal kebutuhannya adalah pembangunan RKB pada MAS Darun Naja < 0701 >	1 SOP, Juklak atau Juknis sebagai pedoman penyaluran bantuan belum ada. Perencanaan anggaran tidak berdasarkan analisis kebutuhan < 0305 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
			4 4. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib administrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	17 Q. Pembangunan RKB MTsS Tarbiyah Islamiyah 1. Juklak/Juknis belum dibuat, seleksi dan verifikasi proposal, serta monitoring /evaluasi belum dilaksanakan; 2. Waktu pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang dilakukan mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai 23 Agustus 2013 namun sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 masih melakukan belanja barang karena belum selesai pekerjaannya; 3. Dalam RKAKL untuk MTS Darul Ilmi namun realisasi untuk MTS Tarbiyah Islamiyah < 0701 >	1 a. SOP, Juklak, Juknis sebagai pedoman penyaluran bantuan belum ada; b. Prosesud pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP; c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang belum berjalan; d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan tidak maksimal; e. Perencanaan anggaran tidak berdasarkan analisis kebutuhan; f. Pengelolaan administrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan; g. pengelola kegiatan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dantanggung jawab < 0702 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P
	18 R. Pembangunan RKB MAS Nurul Huda 1. Juklak/Juknis belum dibuat, seleksi dan verifikasi proposal, serta monitoring /evaluasi belum dilaksanakan; < 0702 >	1 1. SOP, Juklak, Juknis sebagai pedoman penyaluran bantuan belum ada; 2. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang belum berjalan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan tidak maksimal; 4. Pengelolaan administrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan; 5. pengelola kegiatan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dantanggung jawab < 0702 >	3 1. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	22 V. Buffer BSM MTS Beasiswa Untuk Siswa Miskin MTs 1. Dalam Prosedur BSM belum dilengkapi, Juklak/Juknis dan Monitoring/Evaluasi 2. Seluruh siswa yang mendapat bantuan belum menggunakan dana tersebut karena belum diberikan buku rekening oleh bank BRI sebagai penyalur bantuan sehingga tidak dapat diambil; 3. Tidak ada buku/rekening siswa sehingga tidak dapat diukur bahwa dana tersebut telah masuk/terinput pada rekening dan diterima siswa < 0801 >	1 1. SOP, Juklak, Juknis sebagai pedoman penyaluran bantuan belum ada; 2. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP 3. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang belum berjalan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan tidak maksimal; 5. Pengelolaan administrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan; 6. pengelola kegiatan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dantanggung jawab < 0702 >	3 1. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >

P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	23 W. Sosialisasi Penerbitan Paspor oleh Kankemenag Kabupaten/Kota 1. Tidak ada TOR, materi, CV Narsum, evaluasi kegiatan, penutup dan lampiran 2. Penggunaan anggaran tidak sesuai karena untuk pembayaran sewa gedung di hotel tetapi dilaksanakan di aula kantor dan pembayaran untuk peserta tetapi realisasinya tidak dibayarkan 3. Tidak ada TOR yang direncanakan untuk diundang dan daftar hadir peserta, moderator, dan narasumber diragukan kebenarannya 4. Jumlah yang dicairkan dengan realisasi penggunaan tidak sesuai, yaitu adanya bukti pembayaran sewa gedung dan tanda terima pembayaran peserta sebesar Rp. 8.646.000,00 pada realisasinya tidak dilakukan atau fiktif 5. Tidak ada jadwal acara yang dicantumkan dalam laporan dan pelaksanaan pada tanggal 10 jJuni 2013 tetapi pencairan tanggal 15 Juli 2013 < 0801 >	1 1. SOP, Juklak, Juknis sebagai pedoman penyaluran bantuan belum ada; 2. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP 3. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang belum berjalan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan tidak maksimal; 5. Pengelolaan administrasi kegiatan kurang cermat dalam memenuhi kelengkapan dokumen kegiatan; 6. pengelola kegiatan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dantanggung jawab < 0702 >	3 Melaksanakan sosialisasi terhadap kegiatan untuk memahami pembobotan anggaran sesuai SBU tahun berjalan < 0905 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P
			4 Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara				12-11-2015	
	24 Perspektif Internal Proses A. Pembinaan Administrasi Pegawai (IP-1) 1. Materi kegiatan tidak ada, CV Narsum tidak ditandatangani oleh narsum, narasi laporan kegiatan, dan evaluasi kegiatan, serta kuitansi belanja barang formatnya tidak sesuai dengan ketentuan 2. Pre test dan Post test sebagai indikator penilaian pengukuran pemahaman materi sosialisasi tidak dilaksanakan < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dengan SOP; b. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwwenang secara berjenjang; c. administrasi kegiatan pengelolaannya tidak maksimal < 0702 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
				12-11-2015	
	25 B. Belanja Perawatan Gedung Kantor 1. Bukti kuitansi tidak ada nomor dan tanggal kuitansi, spesifikasi pekerjaan tidak jelas, RAB belanja keperluan kantor tidak dibuat. 2. Penggunaan jenis pekerjaan perawatan tidak jelas pekerjaannya; 3. Spesifikasi pekerjaan tidak ada < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; d. perencanaan anggaran tidak berdasrkan analisis kebutuhan < 0305 >	2 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana kegiatan untuk memahami pembobotan anggaran sesuai SBU tahun berjalan < 0612 >	1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
				12-11-2015	
			3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu **Kandepag**					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	26 C. Perbaikan Peralatan Kantor 1. RAB perbaikan peralatan kantor tidak dibuat dan bukti belanja berupa faktur dan kuitansi tidak terdapat nomor dan tanggal; 2. Jumlah realisasi melebihi pagu senilai Rp. 4.805.500,- yaitu dengan menggunakan (MAK 523121) yang sama untuk perawatan kendaraan dipergunakan untuk perbaikan peralatan kantor, item perbaikan peralatan kantor tidak bisa dihitung karena tidak ada RAB < 0802 >	1 a. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan b. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; c. perencanaan anggaran tidak berdasrkan analisis kebutuhan < 0702 >	2 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana kegiatan untuk memahami pembobotan anggaran sesuai SBU tahun berjalan < 0706 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
			3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	27 D. Pengadaan Peralatan / Keperluan Kantor 1. Dokumen kurang lengkap yaitu : (HPS) Harga perkiraan Sendiri; Survey harga pasar minimal 2 penyedia; Penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja); 2. Spesifikasi teknis dan gambar (RKS): Surat Pesanan (SP); Membandingkan harga penawaran dengan HPS; RAB pengadaan peralatan/keperluan kantor tidak dibuat dan bukti belanja berupa faktur dan kuitansi tidak terdapat nomor/tanggal. < 0807 >	1 a. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan b. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; < 0702 >	2 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana kegiatan untuk memahami pembobotan anggaran sesuai SBU tahun berjalan < 0706 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu **Kandepag**					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara				12-11-2015	
			3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
				12-11-2015	
	28 E. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 4 1. RAB tidak dibuat dan dari 16 SP2D tidak lengkap, yaitu : bukti kuitansi tidak dilengkapi dengan nomor tanggal dan spesifikasi pekerjaan 2. Dalam bukti kuitansi tidak merinci jenis/spesifikasi kendaraan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; d. perencanaan anggaran tidak berdasrkan analisis kebutuhan < 0702 >	2 2. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
				12-11-2015	
	29 F. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 1. RAB tidak dibuat dan dari 15 transaksi tidak lengkap a.n : sebagian bukti kuitansi tidak merinci spesifikasi jenis kendaraan; sebagian nomor dan tanggal kuitansi tidak ada 2. Terdapat ketidakjelasan jenis / spesifikasi perawatan kendaraan roda 2 < 0802 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; < 0601 >	2 2. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	30 G. Pengadaan dan Pemasangan Paving Block Halaman Kantor 1. Dokumen pengadaan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tidak sesuai SBD pengadaan barang dan jasa 2. Terdapat 1 pencairan dengan nomor SP2D 442135F/016/11 nomor SPM 10095 dengan nilai Rp. 6.080.000,00 dari 6 pencairan pada pengadaan paving block hanya digunakan untuk pembayaran honor pengelola teknis kegiatan 3. waktu pelaksanaan konsultan perencana dan konsultan pengawasan tidak sesuai dengan permen PU 45 tahun 2007 sehingga dari 3 tahapan 2 diantaranya tidak sesuai. Konsultan perencana sampai BAST I dan Konusltan pengawaas sampai BAST II < 0801 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; d. perencanaan anggaran tidak berdasrkan analisis kebutuhan e. administrasi kegiatan pengelolaannya tidak maksimal < 0601 >	2 2. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	31 H. Lomba Karya Ilmiah Kepenghuluan 1. Laporan kegiatan tidak dilengkapi foto dokumentasi, CV dewan Juri (narsum) dan kuitansi UP tidak sesuai dengan ketentuan; 2. Terdapat kelebihan jumlah panitia sebanyak 2 orang (10% dari peserta) jumlah peserta 12 orang, yang mengakibatkan kelebihan honor panitia sebesar Rp. 570.000,- terdapat kelebihan pembayaran nbiaya Full Day sebesar Rp. 702.000,- dengan rincian sebagai berikut ; total yang mengikuti kegiatan hanya 20 orang (panitia 4 dan peserta 12, dewan juri 4 orang), akan tetapi biaya fullday29 orang, terdapat selisih lebih 9 orang (makan=9 x 30.000 x 2) + (snack=9 x 9.000 x 2) < 0801 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; d. perencanaan anggaran tidak berdasrkan analisis kebutuhan e. administrasi kegiatan pengelolaannya tidak maksimal < 0305 >	2 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana kegiatan untuk memahami pembobotan anggaran sesuai SBU tahun berjalan < 0706 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara			3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	32 I. Pengadaan Sarana KUA berupa 8 unit Laptop 1. Dokumen pengadaan belum dilengkapi : SK Pejabat Pengadaan; Penyusunan KAK; Spesifikasi teknis dan gambar (RKS); Survey Harga Pasar minimal 2 penyedia; HPS (Harga Perkiraan Sendiri); Tahapan dan Jadwal Pengadaan; Surat Pesanan (SP); LDP/Lembar Data Pengadaan; (Lingkup Pekerjaan, Sumber Dana, Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran); BA Serah Terima Barang; rencana pengadaan tidak dibuat; PPK tidak melakukan survey harga pasar dalam menetapkan HPS, tidak melampirkan spesifikasi teknis dan gambar serta berita acara serah terima barang tidak ada 2. Spesifikasi barang tidak dibuat secara rinci & rincian harga barang tidak ada. Survey Harga Pasar minimal 2 penyedia; dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga harga barang sebanyak 8 unit laptop selisih harga kemahalan sebesar Rp. 200.000,- per unitnya dengan type yang sama sebagai pembanding harga dari harga pengadaan Laptop pada bagian umum. terdapat kelebihan harga pembelian dengan selisih harga sebesar (jumlah 6 unit Laptop x Rp. 200.000,- = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) < 1003 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; d. perencanaan anggaran tidak berdasrkan analisis kebutuhan e. administrasi kegiatan pengelolaannya tidak maksimal < 0601 >	2 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana kegiatan untuk memahami pembobotan anggaran sesuai SBU tahun berjalan < 0706 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara			3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P
	33 J. Operasional KUA 1. Laporan Operasional KUA yaitu: dari 18 KUA kecamatan, yang lengkap laporannya hanya 13 KUA kecamatan dan yang belum lengkap laporan pertanggungjawabannya ada 5 KUA Kecamatan yakni KUA Kecamatan Kerkap (Januari s/d Juni), KUA Kec. Pematang Tiga dan Taba Penanjung (Januari s/d Juni dan Desember), KUA Kec. Talang Empat (Desember), dan KUA Kec. Enggano (Januari s/d Desember) 2. Kelengkapan jumlah Laporan Operasional KUA yaitu: dari 18 KUA kecamatan, yang lengkap laporannya ada 13 KUA kecamatan (Januari s/d Desember) dan yang belum lengkap laporan ada 5 KUA Kecamatan yaitu : KUA Kecamatan Kerkap (Januari s/d Juni), KUA Kec. Pematang Tiga dan Taba Penanjung (Januari s/d Juni dan Desember), KUA Kec. Talang Empat (Desember), dan KUA Kec. Enggano (Januari s/d Desember) < 0810 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP b. Pelaksana kegiatan tidak memahami prosedur pengadaan barang dan jasa dan kelengkapan dokumen pengadaan c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang; d. perencanaan anggaran tidak berdasrkan analisis kebutuhan e. administrasi kegiatan pengelolaannya tidak maksimal < 0601 >	1 1. Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, pencairan keuangan, kegiatan monitoring dan evaluasi < 0905 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara			2 2. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	36 M. Monitoring BOS tingkat Kabupaten/Kota Program monitoring dan laporan monitoring BOS tidak dibuat < 0804 >	1 a. Prosedur pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan dalam bentuk SOP e. administrasi kegiatan pengelolaannya tidak maksimal < 0507 >	2 2. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	37 N. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Dari sampel 59 guru PNS (29 guru DIKMAD dan 30 guru PAIS), ada 1 orang guru PAIS tidak melampirkan fotocopy NRG, 3 orang PAIS dan 4 guru DIKMAD yang tidak melampirkan fotocopy SK Dirjen, 30 orang guru PAIS dan 23 guru DIKMAD tidak melampirkan jadwal mengajar, serta guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah, Waka Sekolah/Madrasah, Kepala Perpustakaan/Laboratorium tidk membuat program kerja, jadwal kunjungan, penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan hasil tugas kepengawasan pada satker yang menjadi wilayah kerjanya. < 0806 >	1 1. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang belum berjalan; 2. Kegiatan Evaluasi dan monitoring hasilnya tidak maksimal tidak memberikan arah perbaikan < 0702 >	3 3. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana kegiatan untuk memahami pembobotan anggaran sesuai SBU tahun berjalan < 0706 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu **Kandepag**					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara			4 4. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	39 PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN A. Pembinaan Nikah Rujuk / NR 1. Didalam laporan tidak terdapat materi, CV Narasumber, evaluasi kegiatan, serta kuitansi UP tidak sesuai dengan PMK 190/pmk.05/2012; 2. pre test dan post test tidak dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut; 3. Terdapat kelebihan pembayaran fullday sebesar Rp. 312.000,- dengan rincian sebagai berikut: total yang mengikuti kegiatan hanya 41 orang (panitia 3 orang, peseerta 30 orang, narsum 4 orang, moderator 4 orang), akan tetapi biaya fullday 45 orang, terdapat selisih lebih 4 orang (makan = 4 x 30.000 x 2) + (snack = 4 x 9.000 x 2) < 0502 >	1 a. SOP kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan belum dibuat; b. SBU Sebagai pedoman pembayaran belum dipedomani dengan baik c. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang belum berjalan; < 0506 >	1 1. Menyusun Juklak atau Juknis pemberian bantuan, kegiatan monitoring dan evaluasi < 0903 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
			3 3. Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksana kegiatan untuk memahami pembobotan anggaran sesuai SBU tahun berjalan < 0706 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
Provinsi Bengkulu					
Kandepag					
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara			4 4. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	12-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	40 B. Kegiatan Pembinaan Pengurus BP4 1. Materi narasumber, evaluasi dan jadwal kegiatan belum dibuat 2. Pre test dan post test dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0802 >	1 a. SOP kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan belum dibuat; b. Pengelola kegiatan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab < 0702 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	13-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P
	42 C. Kegiatan terbinanya Guru PAI SD pada Pendidikan Agama Islam a. Tidak ada jadwal kegiatan, CV narsum, laporan hasil kegiatan, evaluasi hasil kegiatan dan ATK kegiatan belum diinput kedalam aplikasi pendataan; b. Pre test dan post test tidak dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0807 >	1 a. SOP kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan belum dibuat; b. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang belum berjalan; c. Fungsi evaluasi dan monitoring belum memberikan kontribusi maksimal untuk perbaikan kinerja kelembagaan d. Pengelola kegiatan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab < 0702 >	2 2. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	13-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 >	P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	43 D. Kegiatan terbinanya Guru PAI SMP pada Pendidikan Agama Islam a. Tidak ada jadwal kegiatan, CV narsum, laporan hasil kegiatan, evaluasi hasil kegiatan dan ATK kegiatan belum diinput kedalam aplikasi pendataan; b. Pre test dan post test tidak dilaksanakan untuk mengukur capaian tujuan diadakannya kegiatan tersebut < 0807 >	1 a. SOP kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan belum dibuat; b. Kontrol / pengendalian dari pejabat yang berwenang secara berjenjang belum berjalan; c. Fungsi evaluasi dan monitoring belum memberikan kontribusi maksimal untuk perbaikan kinerja kelembagaan d. Pengelola kegiatan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab < 0702 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	13-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P
	44 PERSPEKTIF KEUANGAN A. Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen anggaran kegiatan Perbaikan Peralatan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.685.000,00 dan rencana target untuk perbaikan peralatan kantor, realisasi sebesar Rp. 27.490.500,00 (121%) dengan capaian target 12 bulan 100%) dan nilai efisiensi 0,00 sehingga mempengaruhi nilai capiain atas KPI efisiensi terhadap perspektif keuangan memperoleh nilai capaian kinerja dengan skor 0,00 dari skor maksimal 0,02 < 1002 >	1 1. Lemahnya sistem kontrol/pengendalian terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran dari pejabat yang berwenang 2. Ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan tidak sepenuhnya dipedomani dan dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan; 3. Fungsi evaluasi dan monitoring belum memberikan kontribusi maksimal untuk perbaikan kinerja kelembagaan 4. kelemahan dalam pengelolaan administrasi kegiatan 5. penanggungjawab kegiatan tidak memahami mekanisme pembuatan laporan < 0202 >	4 4. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	13-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/143/2014 08/09/2014 Kankemenag Kabupaten Bengkulu Utara	45 B. Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen anggaran kegiatan Tunjangan Profesi Guru Non PNS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 990.000.000,00 dan rencana target untuk pembayaran honor 55 orang, realisasi sebesar Rp. 1.028.844.000,00 (103,92%) dengan capian target 58 orang (105,45%) dan nilai efisiensi 0,37 sehingga mempengaruhi nilai capaian atas KPI efisiensi terhadap perspektif keuangan memperoleh nilai capian kinerja dengan skor 0,33 dari skor maksimal 0,89 < 1002 >	1 1. Lemahnya sistem kontrol/pengendalian terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran dari pejabat yang berwenang 2. Ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan tidak sepenuhnya dipedomani dan dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan; 3. Fungsi evaluasi dan monitoring belum memberikan kontribusi maksimal untuk perbaikan kinerja kelembagaan 4. kelemahan dalam pengelolaan administrasi kegiatan 5. penanggungjawab kegiatan tidak memahami mekanisme pembuatan laporan < 0202 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	13-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P
	46 HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN Kegiatan Pembinaan Manasik Haji pada Kantor Urusan Agama di lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara anggaran BPIH tahun 2013 terdapat kegiatan manasik Haji yang dilaksanakan oleh KUA seharusnya 7 kali kegiatan tetapi dilaksanakan sebanyak 5 kali oleh masing-masing KUA sehingga terjadi kekurangan kegiatan pada tiap KUA sebanyak 2 kali dengan total kelebihan pembayaran sebesar Rp. 8.977.500,00 (Rekapitulasi masing-masing KUA terlampir) dan kelengkapan dokumen laporan hasil kegiatan belum lengkap seperti TOR, CV Narsum, evaluasi hasil kegiatan. < 0601 >	1 a. Penanggung jawab kegiatan belum memahami ketentuan dan tidak tertib dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya b. Kurangnya waskat dari pimpinan < 0704 >	3 3. Menginstruksikan penanggung jawab kegiatan agar lebih meningkatkan tertib adminstrasi atas penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan < 0906 >	13-11-2015 1 Proses. Gerwas di Bekasi, Hotel Horizon 11-13 November 2015 Auditor : Nurul < 0308 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	7 7. PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH (SH-7) a. TOR tidak menjelaskan secara detail jadwal kegiatan, tujuan dan target hasil yang akan dicapai; b. Pembuatan RAB tidak sesuai dengan RKA-KL; c. Narasumber tidak mengisi riwayat pekerjaan; d. Laporan tidak dilengkapi pendahuluan, pelaksanaan, hasil capaian, evaluasi simpulan dan saran; e. Perlengkapan peserta pada meeting digunakan untuk uang saku, ATK, dan penjilidan untuk paket fullday; f. Kegiatan hanya bersifat sosialisasi belum memberi manfaat secara nyata; g. Tidak ada program kerja, SK Kepengurusan serta kriteria dan kualifikasi peserta; h. Terdapat pergeseran realisasi anggaran dari rencana pada RKA-KL yaitu realisasi pembayaran fullday dan uang saku diambil dari PAGU perlengkapan peserta dan ATK; i. Terdapat duplikasi pembayaran honor dan uang saku panitia senilai Rp. 285.000,00 atas nama 1) Mirwanto, A.Md, Kom 2) Hendri Wijaya dan 3) Hera Qomariah NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **285,000.00**	1 1. Pejabat penanggung jawab kegiatan hanya berorientasi kepada realisasi anggaran sesuai DIPA; 2. Belum mempunyai penetapan sasaran target output minimal yang harus dicapai; 3. Kurang pembinaan dan pengawasan dari instansi vertikal < 0702 >	2 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pembinaan Keluarga Sakinah < 0907 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	8 8. HONOR IMAM MASJID KECAMATAN (SH-9) a. Tidak ada juknis atau pedoman; b. Tidak ada verifikasi ataupun dokumen dasr dibuatnya SK penetapan penerima; c. Tidak ada kuitansi atas nama penerima; d. Tidak ada program kerja; e. Tidak ada laporan pelaksanaan kegiatan; f. Honor telah diberikan kepada imam masjid namun pemberian tersebut belum berdasarkan verifikasi atas data calon penerima g. Tidak ada pedoman tentang penetapan pemberian honor kepada imam masjid h. Realisasi pembayaran honor yang telah diberikan kepada imam masjid belum sesuai dengan jumlah pagu pada RKA-KL; i. Pembayaran belum dilaksanakan secara periodik dan konsisten; j. Pembayaran dilakukan secara LS kepada rekening masing-masing < 0801 >	1 Pedoman / standar untuk melaksanakan kegiatan belum dibuat < 0507 >	1 1. Memerintahkan Kasi Bimas Islam untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban pembayaran honor Imam Masjid < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA				23-11-2015
	9 9. KEGIATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI TAHUN 2013 PADA SEKOLAH (SH-10) a. TOR yang dibuat belum menggambarkan jumlah dan asal peserta yang mengikuti kegiatan serta bentuk kegiatan; b. SK Kegiatan belum ada daftar peserta; c. Tidak ada CV peserta dan narsum yang sesuai SK; d. Laporan kegiatan hanya ada berkas-berkas lampiran (dokumen pendukung kegiatan); e. ATK kegiatan tidak diinput ke aplikasi persediaan; f. Terdapat ketidaksesuaian antara bukti pertanggungjawaban penerima honor narasumber dengan penerima honor sebenarnya; g. Terdapat pembayaran pembuatan laporan yang tidak sesuai penggunaannya senilai Rp. 250.000,00 h. Terdapat duplikasi pembayaran honor panitia dan uang saku panitia kegiatan senilai Rp. 361.000,00 i. Ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan di TOR dengan pelaksanaan kegiatan NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **611,000.00**	1 Pedoman/standar untuk melaksanakan kegiatan belum dibuat < 0507 >	1 1. Memerintahkan penanggung jawab kegiatan membuat laporan kegiatan Implementasi Kurikulum PAI tahun 2013 pada sekolah; < 0906 >	1 PROSES baru melampirkan SOP Gerwas, Hotel Horizon Bekasi, 11-13 November 2015 Auditor : Desmi Tanggal 12/11/2015 - 19/11/2015 - 19/11/2015 - 19/11/2015 < 0308 > **P**

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA				23-11-2015
	11 11. KEGIATAN PEMBINAAN KEPALA MADRASAH DINIYAH (SH-12) a. Daftar hadir dan daftar penerima uang saku tidak ditandatangani; b. Laporan tidak memuat (pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan), evaluasi kegiatan, kesimpulan, saran dan penutup c. Evaluasi kegiatan tidak ada dalam laporan; d. Terdapat kelebihan pembayaran Rp. 475.000,00 kepada narsum a.n Ahmad Tarmidzi yang menyampaikan paparan 30 menit sesuai jadwal namun dibayarkan untuk 2 JPL; e. Terdapat double pembayaran untuk honor dan uang saku panitia sebesar Rp. 270.750,00 NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **745,750.00**	1 1. Panitia kegiatan belum memahami pentingnya tertib administrasi; 2. Lemahnya pengendalian intern; 3. Pengelola anggaran belum melaksanakan peraturan yang berlaku < 0702 >	1 1. memerintahkan penanggung jawab kegiatan membuat laporan kegiatan yang sesuai dengan sistematika laporan yang memuat pendahuluan, pelaksanaan, evaluasi dan penutup < 0906 >	1 PROSES baru SOP Gerwas, Hotel Horizon Bekasi, 11-13 November 2015 Auditor : Desmi Tanggal 12/11/2015 - 19/11/2015 - 19/11/2015 - 19/11/2015 - 23/11/2015 < 0308 > P
			2 2. Menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran honor narsum Rp. 475.000.00 **475,000.00** < 0101 >	
			3 3. Menyetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran uang saku panitia sebesar Rp. 270.750,00 **270,750.00** < 0101 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	12 12. KEGIATAN TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH NON PNS (SH-13) a. Terdapat 21 SKMT yang tidak ditandatangani oleh pengawas b. Terdapat 5 guru tidak tertib dalam membuat perangkat administrasi pembelajaran yang meliputi kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, analisis SK/KD, RPP, agenda guru, jurnal kelas dan buku presensi siswa; c. Terdapat 5 guru tidak tertib dalam membuat administrasi kegiatan penilaian yaitu tidak mencantumkan KKM, kisi-kisi soal ulangan, analisis hasil ulangan, program remedial, program pengayaan, buku catatan perkembangan siswa dan bank soal; d. Terdapat 12 guru mengajar tidak sesuai dengan sertifikatnya. < 0806 >	1 1. Supervisi dan pembinaan terhadap tugas pengawas tidak berjalan dengan maksimal; 2. Jumlah pengawas yang terbatas dan kondisi geografis yang luas; 3. Para guru kurang mendapatkan pembinaan tentang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan 4. Jumlah peserta didik yang terbatas pada sekolah / madrasah < 0702 >	1 1. Memerintahkan Kasi Pendidikan Madrasah untuk melakukan pembinaan terhadap guru bukan PNS penerima tunjangan sertifikasi terkait dengan kelengkapan perangkat pembelajaran; < 0904 >	
			2 2. Melakukan pembinaan terhadap pengawas pendidikan untuk memaksimalkan peran pengawas dalam peningkatan kualitas guru khususnya Guru Bukan PNS penerima tunjangan sertifikasi < 0904 >	
	13 13. SOSIALISASI PENERBITAN PASPOR HAJI (SH-14) Tidak membuat laporan hasil kegiatan < 0804 >	1 Pedoman/standar untuk melaksanakan kegiatan tidak dibuat < 0507 >	1 Memerintahkan Kasi PHU untuk : a. Menyusun SOP pelaksanaan kegiatan < 0905 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA			2 Memerintahkan Kasi PHU untuk : b. Membuat laporan dan evaluasi penerbitan paspor haji < 0906 >	
	14 14. KONSULTASI / KOORDIANSI / PENDAMPINGAN / PEMBINAAN (SH-15) a. Tidak ada rincian biaya belanja perjalanan dinas, pengadaan ATK, rencana kebutuhan penggunaan ATK; b. Tidak membuat analisa kebutuhan untuk 1 tahun c. Tidak ada bukti pendistribusian ATK d. Penggunaan anggaran untuk membeli pulpen melebihi kebutuhan yang sebenarnya yaitu realisasi sebanyak 256 pulpen engan biaya sebesar Rp. 2.500.00,00 sedangkan pegawai di PHU hanya 4 orang e. Terdapat ketidakwajaran pemakaian dana sebesar Rp. 1.000.000,00 f. Tidak ada analisa kebutuhan ATK untuk 1 tahun terutama untuk pembelian pena pilot balliner dan pena pilot G1 NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **1,000,000.00**	1 1. Lemahnya pengendalian intern 2. Analisa kebutuhan ATK untuk 1 tahun tidak dibuat < 0705 >	1 1. Menginstruksikan penanggungjawab pengadaan kebutuhan ATK pada PHU agar membuat pernyataan tentang kebutuhan riil ATK pada tahun 2014 terutama untuk pembelian pulpen < 0605 >	
			2 2. Memerintahkan penanggungjawab pembelian kebutuhan ATK agar menyetorkan ke kas negara kelebihan pembelian pena pilot balliner dan pena pilot G1 sebesar Rp. 1.000.000,00 **1,000,000.00** < 0101 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA				
	15 15. OPERASONALTIM MANAJEMEN BOS TINGKAT KAB/KOTA (SH-16) a. Sistematika pelaporan tidak sesuai ketentuan b. Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring tidak dibuat hanya berupa kuesioner nyang tidak dianalisis dan dinarasikan dalam laporan < 0804 >	1 Lemahnya sistem pengendalian Intern < 0705 >	1 Membuat laporan hasil dan evaluasi kegiatan operasional tim BOS tingkat Kabupaten < 0906 >	
	16 PERSPEKTIF INTERNAL PROSES 1. PEMBANGUNAN AULA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SELUMA (IP-5) a. Tidak ada penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) b. Tidak ada survey harga pasar minimal 2 sumber pembanding untuk menentukan HPS < 0806 >	1 Pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa tidak mengacu pada aturan yang berlaku berupa rancangan kontrak < 0306 >	1 1. Membuat SOP pengadaan barang dan jasa < 0905 >	
			2 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terhadap kemampuan pemahaman dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa < 0606 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA				
	17 2. PEMBANGUNAN RABAT BETON (IP-6) a. Tidak ada penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) b. Tidak ada survey harga pasar minimal 2 sumber pembanding untuk menentukan HPS < 0806 >	1 Pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa tidak mengacu pada aturan yang berlaku berupa rancangan kontrak < 0306 >	1 1. Membuat SOP pengadaan barang dan jasa < 0905 >	
			2 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terhadap kemampuan pemahaman dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa < 0606 >	
	18 3. REHABILITASI PAGAR a. Tidak ada penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) b. Tidak ada survey harga pasar minimal 2 sumber pembanding untuk menentukan HPS < 0806 >	1 Pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa tidak mengacu pada aturan yang berlaku berupa rancangan kontrak < 0306 >	1 1. Membuat SOP pengadaan barang dan jasa < 0905 >	
			2 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terhadap kemampuan pemahaman dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa < 0606 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA				
	19 3. BELANJA OPERASIONAL KUA (IP-8) a. Tidak ada perencanaan dan pengawasan oleh Kantor Kemenag dan RAB b. Sebagian besar perjalanan dinas tidak dilengkapi dengan surat tugas c. Laporan perjalanan dinas tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan d. Monitoring TPQ dan Majelis Ta'lim tidak ada laporan hasil kegiatan e. Penggunaan anggaran operasional KUA sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas seperti pembinaan keluarga sakinah, pembinaan TPQ, BKM, menghadiri pelantikan Kepala KUA dan khutbah Jumát; f. Penggunaan anggaran operasional KUA untuk pembayaran transport dalam kota Kepala KUA tidak didasarkan surat tugas oleh pimpinan yang berwenang yang disahkan oleh PPK yaitu sebesar Rp. 35.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. KUA Seluma Timur Rp. 3.170.000,00 2. KUA Talo Rp. 3.230.000 3. KUA Sukaraja Rp. 550.000,00 4. KUA Air Periukan Rp. 440.000,00 5. KUA Semidang Alas Rp. 1.330.000,00 6. KUA Ulu Talo Rp. 150.000,00 7. KUA Semidang Alas Rp. 2.180.000,00 8. KUA Seluma Utara Rp. 5.900.000,00 9. KUA Talo kKecil Rp. 710.000,00 10. KUA Ilir Talo Rp. 7.260.000,00 11. KUA Seluma Barat Rp. Rp. 3.720.000,00 12. KUA Lubuk Sandi Rp. 2.330.000,00 13. KUA Seluma Selatan Rp. 640.000,00 14. KUA Seluma Rp. 610.000,00 g. Tidak ada perencanaan waktu pelaporan keuangan operasional KUA h. Laporan tidak dilaporkan setiap bulan i. Laporan belum memenuhi standar pelaporan NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **32,220,000.00**	1 1. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) tentang penggunaan belanja operasional KUA 2. Tidak memahami tugas fungsi KUA kecamatan 3. Pejabat penanggungjawab lalai melakukan verifikasi terhadap pembayaran belanja operasioanal KUA 4. Kurangnya kesadaran, motivasi, kemauan dan kepatuhan pegawai dalam melakukan tugas dan fungsinya 5. lemahnya pengawasan melekat < 0203 >	1 1. Membuat SOP tentang penggunaan belanja operasional KUA; < 0905 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA			2 2. Menyetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran transport dalam kota perjalanan dinas operasional KUA sebesar Rp. 32.220.000,00 **32,220,000.00** < 0101 >	
			3 3. Melakukan Sosialisasi dan pembinaan secara insentif kepada KUA tentang tugas fungsi dan pemenuhan manajemen administratif KUA; < 0606 >	
			4 4. Membuat SOP pembayaran / penggunaan belanja operasional KUA < 0905 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	20 4. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TUGAS KUA KECAMATAN NR (IP-9) a. Terdapat penggunaan uang saku penghulu dan uang transport yang tidak didukung bukti perjalanan dan surat tugas; b. Tidak ada penetapan (SK, Juklak/Juknis) atas pemberian uang saku dan uang transport penghulu; c. Belanja barang non operasional digunakan untuk uang saku dan uang transport penghulu < 0801 >	1 1. Tidak adanya standar operasional (SOP) tentang penggunaan belanja operasional KUA 2. Tidak memahami tugas dan fungsi KUA kecamatan; 3. Pejabat penanggungjawab lalai melakukan verifikasi terhadap pembayaran belanja operasional KUA 4. Kurangnya kesadaran, motivasi, kemauan dan kepatuhan pegawai dalam melakukan tugas dan fungsinya 5. Lemahnya pengawasan melekat < 0704 >	1 1. Membuat SOP tentang penggunaan belanja operasional KUA; < 0905 >	
			2 2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara insentif kepada KUA tentang tugas fungsi dan pemenuhan manajemen adminsitratif KUA; < 0612 >	
			3 3. Membuat SOP pembayaran / penggunanaan belanja operasional KUA < 0905 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA				
	21 4. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TUGAS KUA KECAMATAN NR (IP-9) d. Terdapat kelebihan pembayaran uang saku penghulu mulai dari Januari s.d Mei 2014 sebesar Rp. 11.874.240,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Harun, S.Ag., Kua Sukaraja Rp. 1.842.240,00 2. Soltanto, S.Pd.I., KUA Seluma, Rp. 528.960,00 3. Lis Sumirat, SH., KUA Talo, Rp. 547.200,00 4. Jayan Asmadi, KUA Semidang Alas Maras, Rp. 1.550.400,00 5. Marlius Putra, KUA Semidang Alas, Rp. 729.600,00 6. Saharuddin, S.Ag., KUA Air Periukan, Rp. 1.130.880,00 7. Drs. Rasiya, KUA Lubuk Sandi, Rp. 474.240,00 8. Buyani, S.Ag., KUA Seluma Barat, Rp. 747.840,00 9. Hamdani Fauzi, S.Sos.I., KUA Seluma Timur, Rp. 912.000,00 10. Abdullah, S.Ag., KUA Seluma Utara, Rp. 419.520,00 11. Nanang Hermanto, KUA Seluma Selatan, Rp. 839.040,00 12. Elon Suparlan, KUA Ulu Talo, Rp. 273.600,00 13. Ahmad Muzami, KUA Ilir Talo, Rp. 1.276.800,00 14. Bambang Indarto, KUA Talo Kecil, Rp. 601.920,00 NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **11,874,240.00**	1 1. Tidak adanya standar operasional (SOP) tentang penggunaan belanja operasional KUA 2. Tidak memahami tugas dan fungsi KUA kecamatan; 3. Pejabat penanggungjawab lalai melakukan verifikasi terhadap pembayaran belanja operasional KUA 4. Kurangnya kesadaran, motivasi, kemauan dan kepatuhan pegawai dalam melakukan tugas dan fungsinya 5. Lemahnya pengawasan melekat < 0704 >	1 Pengelola anggaran dan penanggung jawab kegiatan agar menyetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran uang saku penghulu sebesar Rp. 11.874.240,00 **11,874,240.00** < 0101 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA				
	22 4. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TUGAS KUA KECAMATAN NR (IP-9) e. Terdapat pembayaran uang transport penghulu tanpa ada bukti perjalanan sebesar Rp. 2.956.800,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Harun, S.Ag., Kua Sukaraja Rp. 268.800,00 2. Soltanto, S.Pd.I., KUA Seluma, Rp. 172.800,00 3. Lis Sumirat, SH., KUA Talo, Rp. 57.600,00 4. Jayan Asmadi, KUA Semidang Alas Maras, Rp. 595.200,00 5. Marlius Putra, KUA Semidang Alas, Rp. 172.800,00 6. Saharuddin, S.Ag., KUA Air Periukan, Rp. 422.400,00 7. Drs. Rasiya, KUA Lubuk Sandi, Rp. 96.000,00 8. Buyani, S.Ag., KUA Seluma Barat, Rp. 134.400,00 9. Hamdani Fauzi, S.Sos.I., KUA Seluma Timur, Rp. 192.000,00 10. Abdullah, S.Ag., KUA Seluma Utara, Rp. 134.400,00 11. Nanang Hermanto, KUA Seluma Selatan, Rp. 115.200,00 12. Elon Suparlan, KUA Ulu Talo, Rp. 115.200,00 13. Ahmad Muzami, KUA Ilir Talo, Rp. 249.600,00 14. Bambang Indarto, KUA Talo Kecil, Rp. 230.400,00 NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **2,956,800.00**	1 1. Tidak adanya standar operasional (SOP) tentang penggunaan belanja operasional KUA 2. Tidak memahami tugas dan fungsi KUA kecamatan; 3. Pejabat penanggungjawab lalai melakukan verifikasi terhadap pembayaran belanja operasional KUA 4. Kurangnya kesadaran, motivasi, kemauan dan kepatuhan pegawai dalam melakukan tugas dan fungsinya 5. Lemahnya pengawasan melekat < 0704 >	1 Pengelola anggaran dan penanggung jawab kegiatan agar menyetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran uang transport penghulu untuk bulan juni dan juli sebesar Rp. 2.956.800,00 **2,956,800.00** < 0101 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	23 5. TAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN PELAYANAN PNBP NR LUAR KANTOR (IP-10) a. Pemberian jasa profesi dan transport tidak berdasarkan SK KPA; b. Rekapitulasi jumlah pelaksanaan nikah luar kantor belum ditandatangani KPA c. Laporan pelaksanaan tugas penghulu tidak dibuat; d. Belanja barang dan jasa tidak dilengkapi analisa kebutuhan dan RAB; e. Tidak ada pencatatan pda aplikasi SIMAK; f. Tidak ada stok opname dan catatan penggunaan barang; g. Penggunaan belanja bahan ATK tidak disertai analisa kebutuhan; h. Penggunaan pembayaran transport dan jasa profesi belum sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas; i. Terdapat kelebihan pembayaran uang makan penghulu senilai Rp. 615.600,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Harun, S.Ag NIP 197704022002121001, Rp. 153.900,00 2. Drs. Rasiya, NIP 19663081998031001, Rp. 25.650,00 3. Nanang Hermanto, NIP 15040844000000000, Rp. 51.300,00 4. Abdul Basyir, SH.I, NIP 197305112011011100, Rp. 51.300,00 5. Sabar, S.Ag, NIP 197611022009121003, Rp. 128.250,00 6. Endang Jaya, SH.I, NIP 197704012009121002, 51.300,00 7. Iis Sumirat, SH.I, NIP 198111102009121002, Rp. 51.300,00 8. Ahmad Muzami, NIP 197604012011011005, Rp. 25.650,00 9. Adriansyah, SS, NIP. 198408082011011009 j. Waktu pencairan dilaksanakan akhir tahun anggaran yaitu bulan Desember 2014 NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **615,600.00**	1 1. Tidak adanya standar operasional (SOP) tentang penggunaan belanja operasional KUA 2. Tidak memahami tugas dan fungsi KUA kecamatan; 3. Pejabat penanggungjawab lalai melakukan verifikasi terhadap pembayaran belanja operasional KUA 4. Kurangnya kesadaran, motivasi, kemauan dan kepatuhan pegawai dalam melakukan tugas dan fungsinya 5. Lemahnya pengawasan melekat < 0704 >	1 1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta menetapkan target pencapaian hasil kegiatan untuk kegiatan yang didanai dari PNBP NR < 0903 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA			2 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah terealisasi dari anggaran PNBP NR tahun 2014; < 0906 >	
			3 3. Membuat SK penghulu, pengelola dana PNBP dan tenaga honorer yang melaksanakan tugas pada KUA; < 0901 >	
			4 4. KUA Kecamatan membuat pencatatan dan pembukuan terhadap belanja operasional dan kegiatan pernikahan, penasehatan dan penyuluhan < 0906 >	
			5 5. Menyetorkan ke kas negara kelebihan bayar uang makan sebesar Rp. 615.600,00 **615,600.00** < 0101 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	24 6. KEGIATAN PEMBINAAN GURU MADRASAH PADA MI/MTs (IP-11) a. TOR yang dibuat tidak menggambarkan jumlah dan asal peserta yang mengikuti kegiatan serta bentuk kegiatan; b. SK kegiatan tidak ada daftar peserta; c. Tidak ada jadwal kegiatan d. Biodata peserta hanya 28 orang dari total peserta 30 orang; e. Laporan tidak dicatat dengan tertib; f. Duplikasi pembayaran honor panitia dan uang saku panitia senilai Rp. 270.750,00 g. Ketidak sesuaian waktu pelaksankaan kegiatan dengan TOR NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **270,750.00**	1 1. Penanggung jawab kegiatan kurang memahami peraturan terkait prosedur pelaksanaan dan sistematika laporan kegiatan; 2. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern < 0506 >	1 1. Membuat laporan pembinaan guru madrasah pada MI/MTs dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; < 0906 >	
			2 2. Menyetorkan ke kas negara kelebihan pembayaran uang saku panitia kegiatan pembinaan guru madrasah pada MI/MTs Rp. 270.750,00 **270,750.00** < 0101 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	25 KEGIATAN TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH PNS (IP-12) a. Terdapat 1 orang pengawas tidak membuat program tahunan dan program semester pengawasan; b. Sebagian pengawas tidak membuat berita acara verifikasi atas dokumen sertifikasi guru, form isisan supervisi, data hasil penilaian, instrumen penilaian dan lembar analisa hasil penilaian; c. Sebagian pengawas tidak melakukan supervisi adminsitrasi perencanaan pembelajaran terhadap guru-guru binaannya d. Terdapat 3 orang pengawas tidak membuat laporan tahunan dan laporan semesteran kinerja pengawasan pendidikan di madrasah / sekolah; e. Terdapat 8 guru madrasah tidak mempunyai kalender pendidikan sekolah sebagai acuan minggu efektif proses pembelajaran; f. Sebagian besar guru tidak tertib dalam pemenuhan perangkat administrasi pembelajaran yang meliputi kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, analisis SK/KD, RPP, buku presensi siswa dan tidak membuat agenda guru yang menggambarkan kegiatan belajar mengajar di kelas; g. Terdapa 9 guru madrasah tidak tertib dalam membuat administrasi penilaian siswa dan tidak melakukan kegiatan penilaian yaitu tidak mencantumkan KKM, kisi-kisi soal ulangan, analisis hasil ulangan, program remedial, program pengayaan, buku catatan perkembangan siswa dan bank soal h. Tidak mencantumkan alokasi waktu pada program tahunan i. Program semester tidak ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah j. sebagian guru tidak membuat program kerja dan laporan kinerja k. Terdapat 20 SKMT guru PAI yang tidak ditandatangani oleh pengawas l. Terdapat 21 guru tidak melampirkan SK pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolaj/Madrasah m. Terdapat guru PAIS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, 1 guru tidak membuat program kerja dan 5 guru tidak membuat laporan kinerja kepala	1 1. Supervisi dan pembinaan terhadap pengawas tidak berjalan dengan maksimal; 2. Pengawas tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan; 3. Jumlah pengawas yang terbatas dan kondisi geografis yang luas; 4. Guru belum mendapatkan pembinaan tentang pemenuhan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan 5. Jumlah rombel yang tidak mencukupi untuk pemenuhan jam tatap muka < 0704 >	1 1. Melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja pengawas madrasah dan PAIS < 0907 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	sekolah n. terdapat 3 guru PAIS yang mengajar tidak sesuai dengan sertifikatnya o. Terdapat sisa anggaran Rp. 92.395.500,00 dari total			
KANTOR KEMENAG KAB SELUMA			2 2. Tidak membayarkan tunjangan sertifikasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; < 0502 >	
			3 3. Melakukan pembinaan terhadap pengawas pendidikan untuk memaksimalkan peran pengawas dalam peningkatan kualitas guru; < 0904 >	
			4 4. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan KBM setiap guru < 0807 >	
			5 5. Melakukan supervisi rutin atas pemenuhan perangkat pembelajaran guru PNS penerima tunjangan sertifikasi < 0907 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	26 8. BEASISWA MISKIN a. Terdapat penerima BSM yang tidak melampirkan surat keterangan miskin dan keluarga harapan; b. Tidak ada verifikasi penerima; c. Tidak ada laporan tentang pelaksanaan dan evaluasi kegiatan; d. Terdapat penerima yang tidak mengajukan usulan; e. Terdapat penerima yang tidak sesuai dengan SK; f. Terdapat 8 orang calon penerima BSM yang tidak melampirkan surat keterangan miskin; g. terdapat 3 madrasah yang tidak terdaftar di Kemenag yaitu MIS Batu Tugu, MIS Talang Kebun dan MIS Batu Tugu; h. BSM baru dicairkan bulan Oktober 2014 untuk bantuan periode tahun pelajaran 2013/2014 semester II, terlambat dari batas maksimal bulan Juni 2014 dan hanya 5 Madrasah yang membuat laporan < 0807 >	1 1. Penanggungjawab Bantuan Siswa Miskin (BSM) kurang memahami peraturan terkait prosedur pelaksanaan dan sistematika laporan kegiatan 2. Lemahnya sistem Pengendalian Intern/Waskat dari atasan langsung terhadap pelaksanaan penyluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) 3. Kasi Penma tidak mempunyai database madrasah binaan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Seluma < 0704 >	1 1. Mentaati peraturan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM); < 0502 >	
			2 2. Membuat laporan realisasi BSM berisi: dasar hukum, maksud dan tujuan, proses perencanaan dan pengusulan, penetapan, realisasi pelaksanaan, hambatan dan kendala, hal-hal lain yang tidak sesuai dengan Juknis, serta evaluasi dan simpulan: < 0906 >	
			3 3. Meminta laporan kepada madrasah penerima; < 0906 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA				
			4 4. Membuat database madrasah negeri dan swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Seluma < 0701 >	
	27 PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN 1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian a. Undangan tidak dilampiri jadwal; b. Materi tidak sesuai dengan kondisi (up to date); c. terdapat tanggal daftar hadir tidak sesuai undangan: d. SK tidak dilengkapi uraian tugas narasumber, moderator dan panitia; e. Laporan tidak standar yaitu tidak memuat pendahuluan, pelaksanaan, hjasil dan evaluasi serta simpulan dan saran; f. Dokuimentasi tidak dilampirkan; g. Kegiatan tidak memberikan output nyata terhadap peningkatan pemahaman peserta maupun administrasi pada instansi; h. Kegiatan hanya bersifat sosialisasi: i. Tidak ada kriteria atau kualifikasi peserta pada TOR; j. Tidak didapatkan dokumen verifikasi dan usulan peserta dari masing-masing seksi pada Kementerian Agama k. Dalam laporan pertanggungjawaban antara tanggal undangan dan daftar hadir berbeda < 0807 >	1 1. Kegiatan hanya bersifat seremonial sebagai realisasi berdasarkan alokasi PAGU kegiatan belum mempertimbangkan out put yang seharusnya dicapai; 2. Anggaran belum mendukung pencapaian target tugas dan fungsi organisasi < 0305 >	1 1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta menetapkan target pencapaian hasil kegiatan pembinaan kepegawaian; < 0903 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA			2 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kepegawaian: < 0907 >	
	28 2. Terdapat duplikasi pembayaran honor dan uang saku peserta sehingga terjadi kelebihan uang saku panitia senilai Rp. 275.000,00 NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0211 > **275,500.00**	1 - < 0000 >	1 3. Mengembalikan ke kas negara kelebihan pembayaran uang saku panitia sebesar Rp 275.500,00 **275,500.00** < 0101 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA	29 HAL-HAL KHUSUS YANG PERLU DILAPORKAN a. Daftar hadir pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma pada tahun 2014 tidak menggunakan finger print, sedangkan daftar hadir manual tidak ada jam datang dan jam pulang; b. Berdasarkan sampling audit pda KUA Seluma dan KUA Ilir Talo menunjukkan kinerja KUA tidak maksimal menjalankan tugas fungsi dalam bidang bimbingan calon pengantin, keluarga sakinah, kerukunan umat beragama, haji serta zakat dan wakaf c. Kinerja KUA hanya lebih memprioritaskan kepada pelayanan pernikahan calon pengantin; d. Daftar tarif biaya nikah tidak terpasang di tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat e. Pembinaan SDM khususnya penyuluh dan pengawas masih lemah; f. Bukti pelaksanaan tugas pengaas dan penyuluh dalam melaksanakan tugas tidak memadai; g. Pencatatan barang persedian tidak tertib h. Pegawai yang mempunyai sertifikat barjas hanya dua orang di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Seluma < 0807 >	1 - < 0000 >	1 1. Meningkatkan pengendalian terhadap pemenuhan jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kab. Seluma < 0907 >	
			2 2. Melakukan penertiban kepada KUA terhadap pelaksanaan tugas fungsi pelayanan pernikahan calon pengantin dan tugas fungsi lainnya antara lain pembinaan kerukunan umat beragama, keluarga sakinah, pemberdayaan zakat dan wakaf dan kemasjidan; < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA			3 3. Melakukan penertiban kepada KUA terhadap pelaksanaan administrasi dan manajemen yang mendukung pelayanan masyarakat dan instansi yaitu pembukuan/pencatatan penerimaan dan belanja, pencatatan/pembukuan blangko NR/NA, pencatatan / pembukuan barang persediaan tugas fungsi selain pelayanan pernikahan calon pengantin; < 0906 >	
			4 4. Membuat daftar tarif biaya nikah dan menempatkan pada tempat yang mudah dilihat masyarakat di setiap KUA < 0811 >	
			5 5. Memberikan pembinaan lebih insentif terhadap kinerja penyuluh dan pengawas; < 0904 >	
			6 6. Memerintahkan pegawai pencatatan barang persediaan untuk menertibkan pencatatan sesuai ketentuan < 0605 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0165/2015 18/05/2015 KANTOR KEMENAG KAB SELUMA			7 7. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan barang dan jasa < 0606 >	
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	1 Pembinaan Pengelolaan Wakaf (SH-01). a. ATK kegiatan tidak diinput ke dalam aplikasi persediaa . b. Evaluasi hasil kegiatan tidak ada < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ada . b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum teriaksana secara maksimal. d. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada operator SIMAK BMN untuk menginput ATK/belanja bahan kegiatan ke dalam aplikasi persediaan . c. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan . d. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agardalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. e. Memerintahkan kepada pelaksana pengadaan < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	2 Tunjangan Penyuluh Non PNS (SH-02). a. Jadwal harian, bulanan, daftar hadir dan evaluasi melalui Pokjaluh tidak ada. b. Terdapat selisih kelebihan pembayaran selama 5 bulan x 236 orang x Rp150.000,00 sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). c. Terdapat 2819 laporan dari 3360 laporan yang hams diterima dalam 1 tahun NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0101 > **177,000,000.00**	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ada. b. Pengelolaan kegiatan tidak cermat dan kurang teliti dalam pembayaran tunjangan Penyuluh Honorer dan pada pemberian bantuan tidak berpedoman peraturan yang berlaku. c. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. d. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum teriaksana secara maksimal . e. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran honor Penyuluh Agama Non PNS sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). c. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. d. Menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. e. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. **177,000,000.00** < 0101 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	3 Bantuan Sarana Rumah Ibadah (SH-03). a. RAB, HPS, analisis kebutuhan tidak ada . b. Pembelian barang inventaris untuk masyarakat tidak diinput dalam aplikasi persediaan. c. Spesifikasi barang berupa ambal/sajadah, speaker gantung, kipas angin tidak ada spesifikasi. d. Pembelian barang berupa ambal/sajadah, speaker gantung dan kipas angina pada tanggai 23 Juli 2014 tetapi Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada masyarakat tanggai 04,05,06,07,09,10 dan 11 Juli 2014 < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumiah dan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum teriaksana secara maksimal. d. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada operator SIMAK BMN untuk menginput ATK/belanja bahan kegiatan ke dalam aplikasi persediaan. c. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. d. Menginstruksikan penanggungjawab kegiatan agar dokumen bukti pelaksanaan realisasi anggaran seperti fakturdan kuitansi dari penyedia barang jasa diberi tanggai transaksi dan kuitansi diberi nomor bukti serta ditandatangi oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran; e. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. f. Menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. g. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku . h. Memerintahkan kepada pelaksana pengadaan mendokumentasikan administrasi pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	4 Implementasi Kurikulum PAI tahun 2013 pada Sekolah (SH-04) . a. Lampiran daftar peserta tidak ada di SK. b. Dasar hukum, kesimpulan dan saran pada laporan tidak ada. c. Evaluasi kegiatan tidak ada. d. ATK kegiatan tidak diinput ke dalam aplikasi persediaar . e. Pre test dan post test tidak dilakukan < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumiah dan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum teriaksana secara maksimal. d. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. c. Mengintruksikan kepada guru madrasah untuk membuat program tahunan dan semesteran secara lengkap dan membuat analisis ulangan harian, program perbaikan, program pengayaan dan catatan perkembangan siswa. d. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. e. Menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada . f. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	5 Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS (SH-05). a. Program tahunan dan program semester yang dibuat tidak lengkap. b. Tidak semua guru Analisis ulangan harian, program perbaikan, pengayaan dan catatan siswa. c. Perencanaan jumlah guru yang dianggarkan dalam RKA-KL dengan realisasinya tidak sesua < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. d. Guru lalai dalam memenuhi administrasi pembelajarannya dan pengawas tidak memahami tugas dan fungsinya dengan baik. e. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. c. Mengintruksikan kepada guru madrasah untuk membuat program tahunan dan semesteran secara lengkap dan membuat analisis ulangan harian, program perbaikan, program pengayaan dan catatan perkembangan siswa. d. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. e. Menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada . f. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. g. Menyusun Juknis/SOP penilaian pemenuhan beban kerja guru madrasah/ sekolah dan pengawas. h. Membentuk tim verifikasi penilaian pemenuhan beban kerja guru madrasah/sekolah guna memeriksa pemenuhan berkas BKG sebagai dasar pencairan anggaran TPG. i. Memerintahkan pada semua guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah/Sekolah, Waka Kurikulum, Kesiswaan, Humas, Guru BK, wajib membuat program kerja dan laporan kegiatannya. j. Memerintahkan kepada seluruh pengawas membuat program tahunan dan semester, RKA, RKM dan membuat laporan semester, tahunan serta melaksanakan tugas pengawasan minimal 3 kali pada Madrasah atau guru pada tiap semester jjengan menggunakan instrumen pembinaan guru/kepala. k. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	6 Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013 (SH-06). a. Peserta kegiatan hanya berdasarkan undangan tidak ditetapkan dalam SK. b. Evaluasi kegiatan, kesimpulan dan saran tidak ada dalam laporan. c. Belanja bahan tidak diinput dalam aplikasi persediaan < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada operator SIMAK BMN untuk menginput ATK/belanja bahan kegiatan ke dalam aplikasi persediaan. c. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. d. Menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan secara i. Memerintahkan kepada Penanggung .iawab dan pelaksana kegiatan agar dalam metaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. j. Memerintahkan kepada pelaksana pengadaan mendokumentasikan administrasi pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. k. Membentuk tim verifikasi penilaian pemenuhan beban kerja guru madrasah/sekolah guna memeriksa pemenuhan berkas BKG sebagai dasar pencairan anggaran TPG. l. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2013). < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	7 Sosialisasi Sertifikasi Guru Madrasah (SH-07). a. Tanggal transaksi pada Faktur/nota tidak ada. b. Evaluasi, kesimpulan dan saran tidak ada dalam laporan. c. Daftar penerimaan perlengkapan peserta tidak ada. d. ATK tidak diinput dalam aplikasi persediaan. e. Pre test dan post test tidak dilakukan. f. TOR tidak ada. < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. d. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada operator SIMAK BMN untuk menginput ATK/belanja bahan kegiatan ke dalam aplikasi persediaan. c. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. d. Mengintruksikan kepada guru madrasah untuk membuat program tahunan dan semesteran secara lengkap dan membuat analisis ulangan harian, program perbaikan, program pengayaan dan catatan perkembangan siswa. e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, implementasi dan lain-lain dengan melakukan pre test dan post test kepada peserta. f. Menginstruksikan penanggungjawab kegiatan agar dokumen bukti pelaksanaan realisasi anggaran seperti faktur dan kuitansi dari penyedia barang jasa diberi tanggal transaksi dan kuitansi diberi nomor bukti serta ditandatangi oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran; g. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. h. Menyusun rencana petaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	8 Beasiswa Untuk Siswa Miskin MTs (SH-08). a. Terdapat 9 orang siswa dari 44 siswa yang tidak melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan. b. Terdapat 1 madrasah dari 3 madrasah yang siswanya menerima bantuan tidak menyampaikan laporan. c. Terdapat keterlambatan pencairan bantuan dari batas maksimal bulan Juni 2014 yaitu dicairkan pada bulan Oktober 2014. < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ada. b. Pengelolaan kegiatan tidak cermat dan kurang teliti dalam pembayaran tunjangan Penyuluh Honorer dan pada pemberian bantuan tidak berpedoman peraturan yang berlaku. c. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. d. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. e. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada . b. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. c. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. d. Memerintahkan penanggungjawab kegiatan untuk melengkapi persyaratan pemberian bantuan Siswa miskin berupa Surat Keterangan Tindak Mampu(SKTM) dari kelurahan setempat. e. Menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. f. Memerintahkan kepada Penanggung .iawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	9 Sosialisasi Penerbitan Paspor Haji (SH-09) .jumlah dan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. d. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0602 >	1 _ < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. e. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. f. Memerintahkan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku yaitu; g. Melakukan pre test dan post kepada peserta pada pelaksanaan kegiatan. h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2013). < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	07/12/2015			
	10 Konsultansi/Koordinasi/Pendampingan/Pembinaan (SH-10), a. Program perjadin tidak ada . b. Format laporan tidak sesuai dengan ketentuan. < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. d. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. c. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. d. Menyusun rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. e. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. f. Memerintahkan kepada pelaksana pengadaan mendokumentasikan administrasi pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. g. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2013). < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	11 Sosialisasi Keselamatan Penerbangan (SH-11). a. Biodata peserta tidak ada. b. Kuitansi tidak ditandatangani PPK dan c. ATK tidak diinput ke dalam aplikasi persediaan. d. Pre test dan post test tidak dilakukan. e. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014 tetapi realisasi pembelian konsumsi pada tanggal 14 Mei 2014 < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku . c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. d. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada operator SIMAK BMN untuk menginput ATK/belanja bahan kegiatan ke dalam aplikasi c. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, implementasi dan lain-lain dengan melakukan pre test dan post test kepada e. Menginstruksikan penanggungjawab kegiatan agar dokumen bukti pelaksanaan realisasi anggaran seperti faktur dan kuitansi dari penyedia barang jasa diberi tanggal transaksi dan kuitansi diberi nomor bukti serta ditandatangi oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran; f. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. g. Menyusun rencana petaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. h. Memerintahkan kepada pelaksana pengadaan mendokumentasikan administrasi pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	12 Bantuan Operasional FKUB (SH-12). a. Proposal tidak diverifikasi oleh Kankemenag. b. Monitoring tidak dilakukan < 0602 >	1 a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kurang memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ada. b. Pengelolaan kegiatan tidak cermat dan kurang teliti dalam pemberian bantuan tidak berpedoman peraturan yang berlaku . c. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku terkait dengan prosedur pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta kurang berpedoman pada peraturan yang berlaku . d. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. e. Panitia kegiatan kurang pemahaman tentang sistematika laporan pelaksanaan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku . c. Memerintahkan kepada pelaksana pengadaan mendokumentasikan administrasi pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. d. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2013). < 0502 >	
	13 Perspektif Internal Proses 1 Pembangunan Gedung Sekber (IP-01). a. Instruksi dari SPK perencanaan dan pengawasan kepada peserta (IKP) tidak ada. b. Lembar Data Pemilihan tidak ada . c. Pembanding harga penawaran dan HPS tidak ada. d. Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung serta penetapan penyedia dan pengumuman penyedia tidak ada. < 0602 >	1 a. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. b. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada . b. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. c. Memerintahkan kepada pelaksana pengadaan mendokumentasikan administrasi pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	14 2. Perawatan Gedung Kantor (IP-02). Rencana pemeliharaan dalam satu tahun tidak dibuat < 0602 >	1 a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran yang dibuat tidak menyesuaikan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. < 0502 >	
	15 3. Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 (1P-03). Rencana pemeliharaan dalam satu tahun tidak dibuat. < 0602 >	1 a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran yang dibuat tidak menyesuaikan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	16 4. Operasional KUA (IP-05) . a. SK untuk pembayaran honor kepada 10 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak ada. b. Terdapat 4 KUA Kecamatan tidak melampirkan dokumen RAB untuk usulan pencairan bantuan operasional KUA < 0602 >	1 a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran yang dibuat tidak menyesuaikan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan . c. Control dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Membuat atau merevisi SK Penetapan pemberian honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) KUA Kecamatan dengan mencantumkan 10 orang PTT yang tidak tercantum dalam SK. < 0502 >	
	17 5. Pelayanan Nikah dan Rujuk (IP-06). Terdapat 13 KUA Kecamatan tidak melampirkan RAB untuk usulan pencairan anggaran PNBP NR < 0602 >	1 : a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran yang dibuat tidak menyesuaikan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. c. Menyusun rencana petaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	18 6. Tambahan Alokasi Anggaran Layanan PNBP Luar Kantor (IP-07). Terdapat 15 KUA Kecamatan tidak melampirkan RAB untuk usulan pencairan anggaran PNBP NR < 0602 >	1 a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran yang dibuat tidak menyesuaikan kebutuhan yang ada . b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. c. Menyusun rencana petaksanaan anggaran dan kegiatan secara teliti sesuai alokasi anggaran dan kebutuhan yang ada. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	19 7. TPGPNSDitjenPendis(IP-11). a. Terdapat 9 orang guru PAI untuk pemenuhan jam wajib mengajar tidak sesuai rumpun keahliannya a.n Nila Ismani, Harmiliana, Yuni Hartati, Khairudin, Jasia Hayati, Resda Hartini, Arsita Wati, Iskandan dan Mahlis. b. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah/Sekolah dan wakil kepala sekolah tidak membuat program kerja. c. Pengawas tidak memiliki sertifikat kompetensi. d. Terdapat 3 orang pengawas tidak membuat program tahunan dan program semester, e. Instrument supervisi pengawas tidak dibuat. f. Hanya terdapat 6 bulan laporan yaitu Januari s.d Juni 2014 selama tahun 2014. g. Terdapat 1 orang pengawas yang membuat laporan hanya bulan Februari 2014 a.n Adi Pawarman . h. Terdapat 12 orang guru PAI tidak membuat program tahunan dan program semester, agenda harian, jadwal tatap muka yang dilampirkan untuk kelengkapan pencairan pembayaran tunjangan profesi guru, analisis ulangan harian, program perbaikan dan pelaksanaan remedial, i. Terdapat RPP dari 1 orang guru Madrasah yang tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun dan tidak ditanda tangani kepala Madrasah , j. Terdapat 1 orang guru Madrasah yang tidak membuat analisis ulangan harian, program perbaikan dan pelaksanaan remedial, k. Pengawas Madrasah tidak membuat RKM dan RKA. l. Instrument supervisi pengawas Madrasah hanya supervisi awal masuk sekolah. m. Realisasi pembayaran tunjangan guru PNS tahun anggaran 2014 hanya dibayarkan kepada 94 orang guru dari 154 orang guru < 0602 >	1 a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran yang dibuat tidak menyesuaikan kebutuhan yang ada . b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. d. Tim verifikasi tunjangan profesi guru PNS tidak mensyaratkan dokumen pendukung untuk guru yang mendapat tugas tambahan. e. Guru lalai dalam memenuhi administrasi pembelajarannya dan pengawas tidak memahami tugas dan fungsinya < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi b. Memerintahkan penanggungjawab kegiatan untuk melengkapi persyaratan pemberian bantuan Siswa miskin berupa Surat Keterangan Tindak Mampu(SKTM) dari kelurahan setempat. c. Menyusun Juknis/SOP penilaian pemenuhan beban kerja guru madrasah/ sekolah dan pengawas. d. Membentuk tim verifikasi penilaian pemenuhan beban kerja guru madrasah/sekolah guna memeriksa pemenuhan berkas BKG sebagai dasar pencairan anggaran TPG. e. Memerintahkan pada semua guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah/Sekolah, Waka Kurikulum, Kesiswaan, Humas, Guru BK, wajib membuat program kerja dan laporan kegiatannya. f. Memerintahkan kepada seluruh pengawas membuat program tahunan dan semester, RKA, RKM dan membuat laporan semester, tahunan serta melaksanakan tugas pengawasan minimal 3 kali pada Madrasah atau guru pada tiap semester dengan menggunakan instrumen pembinaan guru/kepala. < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	20 8. Pembayaran Tunjangan Kinerja (IP-12). a. Pemberian tunjangan kinerja tidak memperhitungkan terlambat datang dan pulang cepat serta izin terhadap pegawai. b. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dengan rincian sebagai berikut: Nama Insaudi Ratono, S. Ag, MM Rp131.175,00 2) Mugiyem, SE Rp801.625,00 3) Ade Irma Suryani, ST Rp829.440,00 4) Zuriah, S.Sos Rp541.440,00 5) Bizman.S.HI Rp218.880,00 Total kelebihan pembayaran sebesar Rp2.522.560,00 (dua juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0102 > **2,522,560.00**	1 : a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran yang dibuat tidak menyesuaikan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban < 0605 >	1 a. Menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp2.522.560,00 (dua juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) . b. Melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **2,522,560.00** < 0102 >	
	21 9. Honorarium Penanggung Jawab Laporan Keuangan (IP-13). a. Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran per DIPA tidak ada . b. Berita Acara penyerahan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA tidak ada < 0602 >	1 a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran yang dibuat tidak menyesuaikan kebutuhan yang ada. b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kurang memahami dan mempedomani peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. c. Kontrol dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang/pimpinan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan belum terlaksana secara maksimal. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada . b. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. c. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2013). < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
Kandepag				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	22 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Orientasi Tata Persuratan dan Administrasi Perkantoran (PP-01). a. Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang tercantum pada TOR, rencana tanggal 29 Maret 2014 tetapi pelaksanaan tanggal 28 Maret 2014 . b. Hari dan tanggal kegiatan pada Daftar hadir peserta, panitia, moderator dan narasumber tidak ada. c. ATK kegiatan tidak diinput ke dalam aplikasi persediaan. d. Pre test dan post test terhadap peserta tidak dilakukan. < 0602 >	1 a. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan belum berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku. b. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh pimpinan/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan belum maksimal. c. Bendahara pengeluaran kurang cermat dalam melaksanakan pemotongan dan penyetoran pajak pada realisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada operator SIMAK BMN untuk menginput ATK/belanja bahan kegiatan ke dalam aplikasi persediaan. c. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, implementasi dan lain-lain dengan melakukan pre test dan post test kepada peserta . e. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. f. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2013). < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	23 2. Sosialisasi Pedoman Manajemen PNS (PP-02). a. Hari dan tanggal pada daftar hadir peserta, panitia, moderator dan narasumber tidak ada. b. ATK kegiatan tidak diinput ke dalam aplikasi persediaan. c. Pre test dan post test terhadap peserta tidak dilakukan. < 0602 >	1 a. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan belum berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku . b. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh pimpinan/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan belum maksimal. c. Bendahara pengeluaran kurang cermat dalam melaksanakan pemotongan dan penyetoran pajak pada realisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan. < 0605 >	1 a. Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada . b. Mengintruksikan kepada operator SIMAK BMN untuk menginput ATK(belanja bahan kegiatan ke dalam aplikasi persediaan. c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, implementasi dan lain-lain dengan melakukan pre test dan post test kepada peserta. d. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. e. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2013). < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	24 3. Orientasi Pengelolaan Laporan Keuangan (SAKPA, SIMAK BMN, E-MPA) (PP-03). a. Kuitansi tidak ditandatangani oleh PPK, Bendahara pengeluaran dan penerima uang. b. Nomor bukti kuitansi tidak diisi. c. ATK kegiatan tidak diinput ke dalam aplikasi persediaan. d. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai TOR yaitu perencanaan tanggal 8 Mei 2014 sedangkan pelaksanaan tanggal 21 Mei 2014 < 0602 >	1 a. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan belum berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku . b. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh pimpinan/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan belum maksimal. c. Bendahara pengeluaran kurang cermat dalam melaksanakan pemotongan dan penyetoran pajak pada realisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan. < 0605 >	1 .a Membuat perencanaan anggaran sesuai substansi kegiatan dan kebutuhan yang ada. b. Mengintruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk membuat laporan kegiatan sesuai dengan sistematika laporan. c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, implementasi dan lain-lain dengan melakukan pre test dan post test kepada peserta. d. Menginstruksikan penanggungjawab kegiatan agar dokumen bukti pelaksanaan realisasi anggaran seperti faktur dan kuitansi dari penyedia barang jasa diberi tanggal transaksi dan kuitansi diberi nomor bukti serta ditandatangi oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran; e. Melaksanakan pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan SBU tahun berjalan. f. Memerintahkan kepada Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman sesuai peraturan yang berlaku. g. Melaksanakan realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2013). < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu **Kandepag**				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0385/2015 07/12/2015 Kankemenag Kab. Kaur (IJ/IJ.IV/STUPS.01.5/0115/2015)	25 erdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada Subbag Tata Usaha dengan rincian sebagai berikut NamaJumlah 1)H. Arsan SuryaniRp60.230,00 2)H. Muhamad NasirRp174.900,00 3)Yaswan SumantriRp1.336.320,00 4)Eli SusantiRp1.175.040.00 5)Eleza VerayantiRp1.221.120,00 6)Dadi AfridoRp933.120,00 7)SupriyadiRp610.560,00 8)Andi SuprionoRp276.480.00 9)Elusy AhadiyahRp472.320,00 10)MarleniRp345.600,00 Total kelebihan pembayaran sebesar Rp6.605.690,00 (enam juta enam ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). b. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada Seksi Bimas Islam dengan rincian sebagai berikut: Nama Jumlah 1) Khilman Marbun Rp1.209.725.00 2) Herli Suheri Rp76.050,00 3) Amrina Rosada Rp34.560,00 4) Taslim Z Rp647.625,00 5) Wartono Rp3.069.695,00 Total kelebihan pembayaran sebesar Rp5.037.655,00 (lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). c. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh dengan rincian sebagai berikut:	1 a. Pelaksana kegiatan dalam melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja terhadap pegawai tidak mempedomani peraturan yang berlaku b. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh pimpinan kurang maksimal. a. Melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. < 0605 >	1 a. Melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan kepada masing-masing pegawai untuk menyetorkan ke kas Negara terhadap kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp12.678.935,00 (pada Subbag TU sebesar Rp6.605.690,00 Seksi Bimas Islam sebesar Rp5.037.655,00 dan Seksi PHU sebesar Rp1.035.590,00). < 0502 >	

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Nama Jumlah 1) H. Sofian Jafri Rp378.950,00 2) Doki Hermanto Rp656.640,00 Total kelebihan pembayaran sebesar Rp1.035.590,00 (satu juta tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). < 0602 >			
MAN				
IJ/V/LHA/R/PS.00/0419/2008 MAN Kepahiang Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu	12/09/2008 **Aspek Sarana & Prasarana** 6 Aspek Sarana Prasarana 1. Terdapat sebidang tanah seluas 5.915 m2 diatasnya dibangun gedung pendidikan yang dikuasai oleh MAN Kepahiang belum dilengkapi dengan sertifikat . 2. Terdapat kelemahan dalam penatausahaan BMN dan pengelolaan/pencatatan sarana prasarana antara lain barang persediaan dan barang inventaris pengadaan tahun 2007 dan 2008 belum diberi nomor registrasi. < 0303 >	1 1. Ketentuan yang berlaku belum sepenuhnya dipedomani sehingga tidak dilaksanakan. 2. Waskat belum berfungsi dengan baik. 3. Prosedur yang berlaku tidak dijadikan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. < 0202 >	1 Segera mengurus proses sertifikasi atas tanah yang dikuasai oleh MAN Kepahiang Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu sehinggga diperoleh kepastian hukum atas kepemilikannya. < 0504 >	05-02-2010 1 DALAM PROSES < 0308 > P 14-06-2012 2 PROSES Bukti belum terlampir Auditor : Sri Hindriyanti (Pemuktahiran Ortala, hotel GrandCandi-Semarang, tgl 13-15 Juni 2012) < 0307 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
MAN				
IJ.V/LHA/R/PS.00/0097/2011 MAN KETAHUN	04/03/2011 **Aspek Tugas & Fungsi** 2 1. penugasan guru masih terdapat kelemahan: a. terdapat 12 bidang studi semester ganjil dan 22 bidang studi semester genap belum membuat perangkat pembelajaran, meliputi program tahunan, semesteran, RPP, silabus dan analisis per butir soal b. guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakamad, kepala perpus, dan kepala Lab belum membuat program/ menyampaikan laporan hasil kegiatan tugasnya secara berkala 2. seluruh guru baik GT maupun GTT belum lulus sertifikas 3. Jurnal kelas belum diisi dengan tertib oleh guru pengajar 4. Hasil UN tahun 2009/2010, terdapat 6 siswa yang mendapat nilai dibawah 5 5. perpustakaan belum dikelola secara maksimal 6. fasilitas Lab IPA belum difungsikan < 0702 >	1 1. guru ybs. tidak memahami tugas dan kewajibannya 2. terbatasnya kuota sertifikasi 3. pelaksanaan pendalaman materi belum maksimal dan guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang studi 4. pengelola perpus belum memahami ketentuan yang berlaku 5. ruang Lab. baru selesai dibangun < 0404 >	3 mengusulkan sertifikasi bagi guru GT maupun GTT yang telah memenuhi syarat < 0501 >	26-10-2011 1 PROSES PENDAMPINGAN LK TGL17-30 JULI KANWIL BENGKULU TIM ROBIYANTO H < 0308 > P 14-06-2012 2 PROSES Bukti belum terlampir Auditor : Sri Hindriyanti (Pemuktahiran Ortala, hotel GrandCandi-Semarang, tgl 13-15 Juni 2012) < 0307 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
MAN				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0166/2015 18/05/2015 Madrasah Aliyah Negeri Seluma				02-12-2015
	2 2. Belanja Operasional Siswa MA (SH-2) a. Tidak ada RAB b. Kuitansi tidak ada nomor dan tidak dibubuhi materai c. Tidak ada rincian item yang dibelanjakan d. Terdapat pembelian yang tidak dilengkapi dengan kuitansi e. Faktur dan kuitansi tidak ditanda tangani oleh rekanan dan tidak ada tanggal pada belanja alat-alat listrik dengan bukti nomor 20 tanggal 12 Februari 2014 f. terdapat pencairan anggaran tanpa bukti pembayaran listrik dengan bukti nomor 19 tanggal 10 Februari 2014 g. Pekerjaan pemerataan tanah sebesar Rp 16.000.000,00 tidak ada rincian pekerjaan yang dilaksanakan h. Tidak ada pengumuman dana BOS dipapan pengumuman madrasah yang ditandatangani oleh kepala madrasah, bendahara dan komite madrasah i. Laporan pengelolaan dana BOS belum dibuat j. Pembayaran honor panitia ujian dalam RKA-KL sebesar Rp 120.000,00 dibayarkan Rp 250.000,00 k. Terdapat pembelian yang tidak sesuai dengan MAK l. Terdapat biaya perawatan melebihi dari petunjuk teknis BOS 2014 yaitu perataan tanah dalam satu paket senilai Rp. 16.000.000,00 m. Terdapat pembayaran honor pejabat pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 600.000,00 n. Tidak ada laporan kegiatan yang honornya sudah dibayarkan untuk panitia ujian PPDB dan pemerataan tanah o. Terdapat kelebihan pembayaran honor bendahara BOS selama 6 bulan sebesar Rp 1.710.000,00 p. Tidak ada laporan pencairan dana BOS sebesar Rp. 400.000 q. Terdapat kelebihan pembayaran honor sebesar Rp 851.751,00 NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0107 > **2,961,751.00**	1 1. Pengelola BOS belum memahami pentingnya tertib administrasi 2. Lemahnya pengendalian intern 3. Pengelola anggaran belum mentaati peraturan yang berlaku < 0704 >	4 Memerintahkan pengelola anggaran dan penanggung jawab BOS agar menyetorkan ke Kas Negara atas pembayaran honor bendahara BOS sebesar Rp 1.710.000,00, dana laporan BOS sebesar Rp 400.000,00 dan kelebihan pembayaran honor sebesar Rp 851.751,00 **2,961,751.00** < 0101 >	1 Proses. - Terlampir surat Instruksi Setor ke Kas negara no. MA.07.12/Kp.01.2/284/2015 tanggal 30 April 2015 - Belum terlampir bukti setor < 0308 >

P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
MAN				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0166/2015 18/05/2015 Madrasah Aliyah Negeri Seluma				
	5 2. Pengadaan Meja Kursi Siswa (IP-2) a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak dibuat b. HPS tidak didukung dengan survey harga pasar minimal 2 pembanding < 0806 >	1 1. Peraturan yang berlaku belum dipedomani 2. Pengendalian/kontrol dari pejabat berwenang terhadap kelengkapan bukti prosedur pengadaan tidak maksimal 3. Terbatasnya SDM yang lulus/memiliki sertifikat barang dan jasa < 0704 >	2 Membuat SOP pengadaan barang dan jasa < 0504 >	02-12-2015 1 Proses. Belum terlampir SOP Pengadaan Barang dan Jasa. Hanya terlampir SOP Pencairan Anggaran LS < 0308 > P
	6 3. Pembangunan Pagar (IP-3) a. Tidak ada penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) b. Tidak dibuat survey harga pasar minimal 2 sumber pembanding untuk menentukan HPS c. Pemasangan pintu gerbang tidak sesuai dengan gambar yang ada d. Tidak dilakukan pembangunan pagar seluas 23,76 m2 x @ Rp 16.846,00 = Rp. 400.260,96 NILAI KERUGIAN NEGARA / KEWAJIBAN PENYETORAN (Rp.) < 0107 > **400,260.96**	1 1. Peraturan yang berlaku belum dipedomani 2. Pengendalian/kontrol dari pejabat berwenang terhadap kelengkapan bukti prosedur pengadaan tidak maksimal 3. Terbatasnya SDM yang lulus/memiliki sertifikat barang dan jasa < 0704 >	2 Membuat SOP pengadaan barang dan jasa < 0501 >	02-12-2015 1 Proses. Belum terlampir SOP Pengadaan Barang dan Jasa. Hanya terlampir SOP Pencairan Anggaran LS < 0308 > P
	7 4. Pengadaan Laptop (IP-4) Proses pengadaan langsung tidak dilakukan oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) < 0401 >	1 1. Peraturan yang berlaku belum dipedomani 2. Pengendalian/kontrol dari pejabat berwenang terhadap kelengkapan bukti prosedur pengadaan tidak maksimal 3. Terbatasnya SDM yang lulus/memiliki sertifikat barang dan jasa < 0704 >	2 Membuat SOP pengadaan barang dan jasa < 0501 >	02-12-2015 1 Proses. Belum terlampir SOP Pengadaan Barang dan Jasa. Hanya terlampir SOP Pencairan Anggaran LS < 0308 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
MAN				
IJ.IV/LHA/R/PS.01.1/0166/2015 Madrasah Aliyah Negeri Seluma	18/05/2015			
	12 4. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan/kompetensi terhadap administrasi manajemen keuangan < 1002 >	1 - < 0000 >	1 Menunjuk pegawai di lingkungan madrasah yang mempunyai potensi atau kompetensi terhadap administrasi manajemen keuangan untuk belajar dan membantu tugas-tugas administrasi keuangan < 0504 >	
MTsN				
IJ.V/LHA/R/PS.00/0274/2010 MTsN 1 KOTA BENGKULU	28/06/2010			
	Aspek Sarana & Prasarana			11-07-2011
	9 Terdapat beberapa bidang tanah yang diperoleh dari wakaf dan APBN seluas 4.990 m2 (peruntukan bangunan dan pelatihan) dan tanah untuk jalan seluas 806 m2 dengan bukti kepemilikan/sertifikat belum a.n. MTsN 1 Bengkulu selaku satker dan Nadzir. < 0303 >	1 Kelengkapan surat-surat kepemilikan asset tidak menjadi perhatian pejabat pengelola sarpras, Peraturan perundangan yang terkait tentang sertifikasi tanah belum dipahami oleh pejabat yang berwenang. < 0509 >	1 Membaliknamanakan sertifikat menjadi a.n. Kemenag cq. MTsN 1 Bengkulu satker dan Nadzir < 0502 >	1 terlampir surat No. MTs.07.18/KS.01/198/2010 kepada Kankemenag Kota Bengkulu tentang usul pensertifikatan tanah **P** < 0308 >
				26-10-2011
				2 PROSES Telah di cek oleh Auditor (Robby), pendampingan tim Itjen di Kanwil Prov. Bengkulu tanggal 17-30 Juli 2011. **P** < 0307 >

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
MTsN				
IJ.V/LHA/R/PS.00/0274/2010 28/06/2010 MTsN 1 KOTA BENGKULU				14-06-2012 3 PROSES Bukti belum terlampir Auditor : Sri Hindriyanti (Pemuktahiran Ortala, hotel GrandCandi-Semarang, tgl 13-15 Juni 2012) < 0307 > P
				17-11-2015 4 PROSES Terlampir surat Kepala MTSn 1 Bengkulu tentang Usulan Balik Nama Sertifikat dengan nomor : MTs.07.18/Ks.01.1/564.b/2015 tanggal 3 November 2015 Gerwas Hotel Horison Bekasi Tanggal 11-13 November 2015 Auditor : Desmi Tgl. 12 November 2015 < 0308 > P
	Aspek Sarana & Prasarana 10 Terdapat 6 unit bangunan gedung pendidikan MTsN 1 Kota Bengkulu belum memiliki IMB < 0303 >	1 Petugas pengelola sarpras belum mengerti cara pembuatan IMB < 0509 >	1 Mengurus pembuatan IMB 6 unit bangunan gedung pandidikan MT2N 1 Bengkulu < 0501 >	26-10-2011 1 PROSES Terlapir surat nomor: MTs.08/07.18.ks.01.1/207/2011 tanggal 27/07/2011 tentang permohonan IMB, di cek oleh Auditor (Robby), pendampingan tim Itjen di Kanwil Prov. Bengkulu tanggal 17-30 Juli 2011. < 0307 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
MTsN				
IJ.V/LHA/R/PS.00/0274/2010 28/06/2010 MTsN 1 KOTA BENGKULU				14-06-2012 2 PROSES Bukti belum terlampir Auditor : Sri Hindriyanti (Pemuktahiran Ortala, hotel GrandCandi-Semarang, tgl 13-15 Juni 2012) < 0307 > P
				19-11-2015 3 PROSES Terlampir surat MTS.07.18/Ks.01.1/565.b/2015 tanggal 03/11/2015 usulan dari kepala MTsN 1 Kepada Dinas Tata Kota, Kota Bengkulu Gerwas, Hotel Horizon Bekasi, 11-13 November 2015 Auditor : Desmi Tanggal 12/11/2015 < 0308 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
MTsN				
IJ.V/LHA/R/PS.00/0104/2011 MTsN 2 KOTA BENGKULU	04/03/2011 **Aspek SDM** 4 terdapat 3 guru yang melanjutkan pendidikan belum memiliki izin belajarnya: - Ratna Juwita - Mutia Eka Putri - Imam Hanuji < 0302 >	1 ketentuan tentang prosedur tugas belajar belum dipahami < 0509 >	1 mengusulkan surat izin belajar ybs. kepada Sekretariat Jenderal Kemenag sesuai ketentuan < 0501 >	05-07-2011 1 terlampir: - surat kepada Ratna Juwita, Mutia Eka Putri, Imam Hanuji No.MTs.07.19/KP.01.1/062/2011 tentang pengajuan surat izin belajar - surat kepada Kakanwil dari Ratna Juwita permohonan izin belajar - surat kepada Sekjen tentang permohonan izin belajar a.n. Imam Hanuji no. Kw.07.1/2/Kp.02.3/1311/2007 a.n. Ratna Juwita dan Mutia Eka Putri belum mengusulkan ke Setjen < 0307 > P
				14-06-2012 2 PROSES Bukti belum terlampir Auditor : Sri Hindriyanti (Pemuktahiran Ortala, hotel GrandCandi-Semarang, tgl 13-15 Juni 2012) < 0307 > P

Nomor LHP dan Tgl. LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Provinsi Bengkulu				
MTsN				
IJ.V/LHA/R/PS.00/0104/2011 04/03/2011 MTsN 2 KOTA BENGKULU				19-11-2015 3 PROSES Dari 3 orang telah di TL 1 orang dengan surat pernyataan nomor : 07.19/KP.01.2/160.A/2015 Tanggal 16/10/2015 atas nama Mutia Eka Putri tentang tidak untuk digunakan kepangkatan Gerwas, Hotel Horizon Bekasi, 11-13 November 2015 Auditor : Desmi Tanggal 12/11/2015 < 0308 > P